

ORIENTASI KUALITAS PERMUKIMAN KOTA TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN-FISIK (STUDI KASUS: GAMPONG HAGU SELATAN, KECAMATAN BANDA SAKTI, KOTA LHOKSEUMAWE)

Effan Fahrizal*, Abib Al Mujihad, dan Eri Saputra

*Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh
Email: effan@unimal.ac.id

Abstrak

Kebutuhan masyarakat akan hunian berkembang sebagai respon spontan terbentuknya permukiman kota. Kemerosotan kualitas lingkungan permukiman menjadi permasalahan yang menarik untuk diperhatikan. Penelitian ini dilakukan dengan memaparkan penyebab terkait merosotnya kualitas lingkungan-fisik permukiman Gampong Hagu Selatan juga mengetahui Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas permukiman masyarakat Gampong Hagu Selatan terhadap keberlanjutan lingkungan-fisik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui prosedur pemecahan permasalahan untuk mengkaji dengan mencoba untuk mengerti, mendalami, dan menerobos masuk kedalam suatu gejala-gejala yang sangat dalam kemudian mencoba untuk menjelaskan dan menyimpulkan gejala-gejala ini sesuai dengan permasalahan yang dialami. Perkembangan permukiman Gampong Hagu Selatan khususnya di Dusun Tugu Pahlawan tidak didukung dengan adanya sarana serta prasarana yang memadai. Permasalahan kemerosotan kualitas fisik lingkungan permukiman diatasi melalui upaya pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali. Peningkatan kualitas lingkungan dan penanganan kumuh menjadikan kawasan permukiman masyarakat bebas kumuh melalui pembangunan tempat wisata yang juga membuat masyarakat lebih produktif dalam memperoleh penghasilan. Faktor kebersihan masyarakat menjadi landasan dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat. Penanggulangan permasalahan kemerosotan kualitas fisik pada permukiman dilakukan proses pendekatan terhadap masyarakat dengan separtisipatif mungkin, sehingga pada saat program penanganan kumuh berjalan tidak terjadi perlawanan dari masyarakat karena telah diberi pemahaman yang baik.

Kata kunci: *Permasalahan, Peningkatan, Kualitas Permukiman, Lingkungan-Fisik*

Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat akan hunian berkembang sebagai respon spontan terbentuknya permukiman kota. Sistem sosial jika ditinjau sebagai perspektif kampung kota merupakan sebuah tatanan sosial yang kompleks, terdapat keanekaragaman dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, etnis, dan kedudukan politik berbeda. Pola sosial di dalam permukiman merupakan sebuah persepsi tentang hubungan antara arsitektur baik itu bangunan rumah maupun cakupan yang lebih luas yaitu permukiman dengan manusia sebagai pelaku didalamnya. Manusia sebagai faktor terbentuknya permukiman tentulah berperan aktif dalam mewujudkan permukiman yang baik.

Sebagai makhluk sosial manusia tentu membutuhkan manusia lainnya sehingga terjadilah interaksi terhadap sesamanya, kemudian terbentuklah tatanan-tatanan dalam masyarakat untuk menjalankan suatu sistem sosial, sehingga kondisi ini memberikan kontribusi besar terhadap terbentuknya arsitektur permukiman. Ditinjau dari segi ekonomi permukiman kota yaitu suatu sistem dari ekonomi dinamis dikarenakan berbagai kegiatan masyarakat dan usaha produktifnya berperan sebagai pendukung kegiatan ekonomi kota [1].

Bersamaan dengan ini tidak dapat dipungkiri berbagai permasalahan menyangkut permukiman kota muncul seiring perkembangan kota. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang melatarbelakangi masyarakat kota, tidak hanya dari faktor penghasilan yang rendah akan tetapi berkaitan dengan budaya yang berkembang di lokasi yang menjadi tempat tinggal mereka. Kemiskinan dijadikan alasan untuk hidup di lingkungan yang buruk, persepsi inilah yang tumbuh dan berkembang sehingga membudaya di lingkungan masyarakat yang berdampak pada wujud arsitektur permukiman yang buruk.

Selain itu, kemerosotan kualitas lingkungan permukiman di daerah perkotaan menjadi permasalahan yang juga menarik untuk diperhatikan terutama dari aspek fisik, permukiman dikaitkan dengan kondisi kepadatan tinggi dan kawasan yang kumuh. Sebagian kawasan merupakan permukiman kumuh. Perkembangan permukiman kota tidak didukung dengan adanya sarana serta prasarana yang memadai. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan yang tidak memenuhi standar persyaratan teknis maupun kesehatan dengan minimnya sarana dan prasarana serta utilitas kawasan. Kemudian kondisi bangunan sangatlah buruk dengan penggunaan material bangunan yang bersifat semi permanen. Untuk kepadatan bangunan dan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) lebih besar dari yang telah diatur. Bangunan juga memiliki fungsi yang bercampur dan tidak beraturan, pada umumnya masih terdapat bangunan yang berdiri di atas tanah milik negara atau dihuni secara ilegal. Dalam menghadapi permasalahan kemerosotan kualitas lingkungan-fisik permukiman diperlukannya tindakan nyata oleh Pemerintah, aparat desa dan masyarakat berupa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas permukiman. Penelitian ini berfokus pada permukiman masyarakat Kota Lhokseumawe tepatnya di desa Hagu Selatan sebagai objek penelitian dalam upaya peningkatan kualitas permukiman terhadap keberlanjutan lingkungan-fisik.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Ayat 5 Tahun 2011, Permukiman merupakan suatu lingkungan hunian yang terdiri dari banyak perumahan didalamnya serta dilengkapi dengan sarana, prasarana dan sistem utilitas yang memadai sebagai penunjang kegiatan masyarakat di satu kawasan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Ayat 3 Tahun 2011, dapat kita ketahui bahwasannya kawasan permukiman merupakan bagian dari kawasan hidup di luar dari batasan kawasan lindung, baik itu di perkotaan atau perdesaan yang memiliki fungsi yaitu sebagai lingkungan tempat tinggal maupun hunian dan tempat yang mendukung kegiatan hidup dan penghidupan.

Perumahan dan permukiman dalam perkembangannya di kawasan kota disebabkan oleh beberapa hal, yaitu [2]:

1. Pertambahan jumlah penduduk (Growth of density)

Jumlah penduduk bertambah disebabkan oleh kelahiran sehingga jumlah keluarga ikut bertambah yang berakibat pada permasalahan baru. Secara manusiawi mereka ingin memiliki rumah pribadi yang justru ikut menambah jumlah hunian baru yang semakin membuat padat kawasan kota.

2. Urbanisasi (Urbanization)

Daya tarik kota menyebabkan dorongan bagi penduduk desa untuk pindah ke kota yang juga berdampak langsung pada pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman pada kawasan perkotaan.

Kemiskinan menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas lingkungan fisik permukiman. Jumlah ekonomi yang terbatas hanya cukup dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga mereka kurang mampu dalam pemeliharaan kualitas bangunan yang berakibat pada kondisi fisik yang buruk dan kekumuhan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 berkenaan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman kumuh yaitu permukiman tidak layak huni karena tidak beraturannya bangunan, kepadatan bangunan dengan tingkat yang tinggi, dan ketersediaannya sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh untuk lebih jelasnya terdapat pada peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2018.

Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan, selain menjadi suatu sistem yang berguna pada dunia bisnis, analisis SWOT juga dapat diaplikasikan dalam menganalisis suatu permukiman untuk meninjau tingkat kualitas, permasalahan, peluang dan upaya penyelesaian permasalahan pada permukiman. [3]

Metodologi Penelitian

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data ini yaitu untuk memperoleh gambaran berkenaan dengan permukiman warga. Kemudian dikaitkan dengan status sosial masyarakat desa serta permasalahan yang terdapat pada permukiman tersebut dan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada melalui upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas permukiman masyarakat Gampong Hagu Selatan. Penelitian dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif untuk mengkaji dengan mencoba mengerti, mendalami, dan menerobos masuk kedalam suatu gejala-gejala yang sangat dalam kemudian mencoba untuk menjelaskan dan menyimpulkan gejala-gejala ini sesuai dengan permasalahan yang dialami. Pada akhirnya diperoleh simpulan bersifat objektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks penelitian tersebut yang sifatnya subjektivitas. Penelitian ini mendeskripsikan kejadian pada lokasi objek berdasarkan sebagaimana mestinya. Pendeskripsian dilakukan secara jelas dan menyeluruh sehingga penggambaran objek jelas.

Hasil dan Pembahasan

Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 berkenaan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman kumuh yaitu permukiman tidak layak huni karena tidak beraturannya bangunan, kepadatan bangunan dengan tingkat yang tinggi, dan ketersediaannya sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh merupakan sebagai suatu kawasan identik dengan kawasan dengan kelebihan penduduk, sarana dan prasarana yang tidak memadai, miskin, kotor, berbahaya, tidak aman dan banyak lainnya stigma negatif yang melekat pada permukiman. Sedangkan definisi lainnya menyebutkan permukiman kumuh sebagai permukiman atau perumahan orang-orang miskin dengan penduduk yang padat, terdapat lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian kota secara keseluruhan,

biasanya disebut dengan wilayah semerawut atau pencomberan.[4][5]

Kebijakan Pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 berbunyi yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Regulasi Pelaksanaan Pengentasan Perumahan dan Permukiman Kumuh.

- a. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Bab VIII: Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh).
- b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Qanun Pemerintah Kota Lhokseumawe No. 11 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- d. Peraturan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

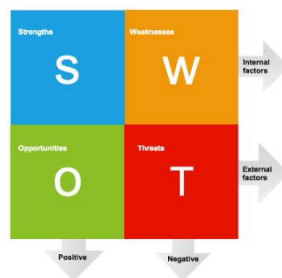
Pola Penanganan Fisik Perumahan dan Permukiman

Ervianto & Felasari menyatakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya area kumuh dapat dilakukan melalui[6]:

1. Perencanaan dengan adanya aturan hukum dari pemerintah.
2. Pemugaran, pemerintah membuat penyusunan perencanaan kawasan terkait untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kembali menjadi permukiman yang layak.
3. Peremajaan, mewujudkan permukiman yang jauh lebih baik dengan melakukan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh.
4. Pemukiman kembali, dilakukan dengan memindahkan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali dikarenakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan rawan terhadap bencana yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan.

Analisis SWOT

SWOT atau singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman) merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan pada suatu spekulasi bisnis pada proyek. SWOT merupakan berbagai faktor sistematis sebagai identitas dalam merumuskan strategi pelayanan. Analisis SWOT dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan logika untuk memaksimalkan peluang yang secara bersamaan meminimalisir kekurangan juga ancaman. SWOT adalah teknik yang dirancang oleh Albert Humphrey pada saat memimpin riset proyek di Universitas Stanford pada tahun 1960-1970 dengan data yang digunakan dari perusahaan fortune 500.[7]



Gambar 1. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan, selain menjadi suatu sistem yang berguna pada dunia bisnis, analisis SWOT juga dapat diaplikasikan dalam menganalisis suatu permukiman untuk meninjau tingkat kualitas, permasalahan, peluang dan upaya penyelesaian permasalahan pada permukiman. SWOT terbagi kedalam analisa internal dan analisa eksternal. Analisa internal mengkaji potensi dan peluang untuk dimaksimalkan pada permukiman, sedangkan analisa eksternal mencoba untuk mengecilkan tingkat kelemahan dan ancaman yang ada di permukiman. [3]

Tabel 1. Strategi Kemungkinan dalam Matrix SWOT [8]

	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
OPPORTUNITIES (O)	<u>Strategi SO</u> Strategi menggunakan kekuatan dalam menghasilkan peluang.	<u>Strategi WO</u> Strategi dibuat untuk meminimalisir kelemahan dalam memanfaatkan peluang.
THREATS (T)	<u>Strategi ST</u> Strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman.	<u>Strategi WT</u> Strategi yang dapat mengurangi kelemahan dan menghindari bentuk ancaman.

Pola Penanganan Fisik Perumahan dan Permukiman

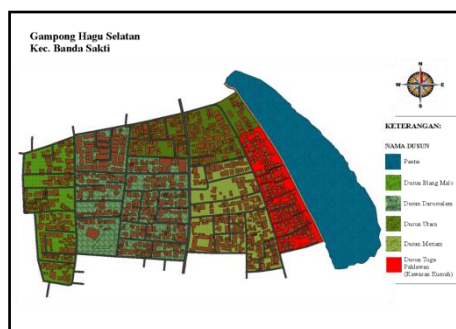
Gampong Hagu Selatan termasuk kedalam Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Gampong Hagu Selatan merupakan hasil dari pemekaran Gampong Hagu, pada tahun 1981 Gampong Hagu dibagi menjadi tiga Gampong yaitu Hagu Teungoh, Hagu Barat Laut, dan Hagu Selatan. Setelah pemekaran sistem pemerintahan Gampong berdiri sendiri, namun masih tetap berada dibawah pemerintah Kecamatan Banda Sakti, Aceh Utara. Kemudian dengan adanya pemekaran Kabupaten Aceh Utara terbagi menjadi Kabupaten Aceh Jeumpa dan Kota Administratif Lhokseumawe (KOTIP Lhokseumawe). Selanjutnya berubah lagi menjadi Kota Lhokseumawe dan Hagu Selatan masih berada dibawah pemerintahan Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.



Gambar 2. Kerusakan Akibat Gelombang Pasang

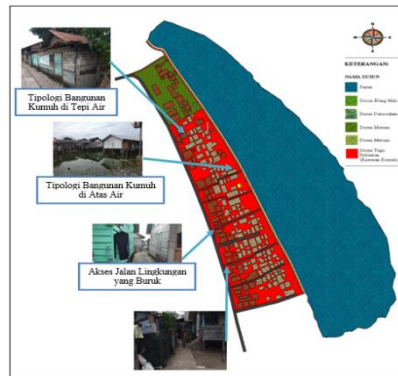
Identifikasi Permasalahan Fisik Permukiman Gampong Hagu Selatan

Permasalahan pada objek penelitian berfokus pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur. Identifikasi permasalahan kumuh dilakukan berdasarkan pertimbangan yang didapat melalui pengertian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, persyaratan teknis PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Berdasarkan hasil penelitian pada Gampong Hagu Selatan permasalahan kumuh berat terjadi di Dusun Tugu Pahlawan. Permasalahan ini juga didukung dengan adanya SK Walikota No 342 Tahun 2014 dalam luas kumuh adalah 4,81 Ha dari luas Administrasi wilayah yaitu 4,82.



Gambar 3. Peta Kawasan Kumuh Gampong Hagu Selatan

Identifikasi permasalahan kemerosotan kualitas permukiman yang diakibatkan oleh kekumuhan Pada Gampong Hagu Selatan terjadi di Dusun Tugu Pahlawan. Berdasarkan letak geografi tipologi perumahan kumuh pada lokasi yaitu perumahan yang berada diatas air dan perumahan di tepi air dikarenakan lokasi berada di kawasan pesisir.



Gambar 4. Identifikasi Perumahan Kumuh

Identifikasi kemerosotan pada lokasi perumahan dan permukiman ditinjau melalui Peraturan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Nomor 14 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lampiran II berkenaan dengan identifikasi dan penilaian lokasi perumahan dan permukiman.

1. Kondisi Bangunan Gedung
 - a. Berdasarkan pengamatan pada lokasi penelitian sebagian besar bangunan tidak memiliki keteraturan baik dalam hal dimensi, orientasi, bentuk tapak maupun bangunan.
 - b. Bangunan memiliki tingkat kepadatan yang tinggi tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 - c. Bangunan pada lokasi sebagian besar tidak memenuhi syarat, khususnya persyaratan teknis bangunan sederhana.
2. Kondisi Jalan Lingkungan
 - a. Pelayanan jalan bangunan yang buruk. Luas jalan tidak sinkron dengan luas area yang berarti jalan lingkungannya masih belum melayani seluruh lingkungan perumahan.
 - b. Kualitas jalan lingkungan kondisinya sangat buruk. Jalan tidak memungkinkan kendaraan untuk dapat berlaju dengan cepat, aman, dan nyaman termasuk akses bagi mobil yang tidak memungkinkan untuk dilalui.
3. Kondisi Akses Air Minum
 - a. Akses sistem penyedia air minum pada lokasi tidak tersedia, baik itu jaringan perpipaan penyalur air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), maupun ketersediaan sumur yang mana airnya tidak dapat digunakan untuk minum. Akses air minum masyarakat Hagu Selatan khususnya daerah pesisir sangatlah buruk, ketersediaan air semakin susah bagi warga di kawasan pesisir dikarenakan sebagian air yang dihasilkan merupakan air asin yang tidak bisa dikonsumsi.
 - b. Kebutuhan air minum tidak memadai minimal 60 liter/orang/hari.
4. Kondisi Drainase Lingkungan
 - a. Ketersediaan drainase lingkungan belum memadai, tidak merata di seluruh bangunan.
 - b. Limpasan air hujan tidak mampu dialirkan pada drainase lingkungan sehingga menimbulkan genangan, bahkan genangan minimal dengan tinggi lebih dari 30 cm dan selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun.
 - c. Kondisi konstruksi drainase yang buruk.
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai terhadap resiko pencemaran lingkungan. Sistem pengelolaan air limbah tidak mampu mengatasi timbulan limbah minimal 5-40 liter/orang/hari.

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
Sarana dan prasarana pada sebagian besar wilayah masih belum memadai. Pengelolaan persampahan masih belum mampu menangani timbulan sampah yang dihasilkan minimal sebesar 0,3 kg/orang/hari.
7. Kondisi Keamanan
 - a. Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengaman kebakaran berupa pasokan air yang disimpan dalam tangki air, hidran, dan sebagainya.
 - b. Jalan lingkungan tidak memungkinkan untuk dilalui mobil pemadam kebakaran juga ambulan sebagai bentuk pertolongan saat bencana terjadi. Harusnya jalan pada lingkungan memiliki lebar minimal 3,5 meter dan terhindar dari hambatan.
 - c. Kondisi permukiman yang berada di pinggiran pantai harusnya terdapat alarm penanda bencana gempa yang berpotensi tsunami sebagai bentuk siaga bencana mengingatkan Lokasi permukiman berada di kawasan rawan bencana.

Identifikasi Aspek Pertimbangan Lainnya

1. Sosial Ekonomi

Lokasi Gampong Hagu Selatan sebagai objek penelitian terkhusus Dusun Tugu Pahlawan memiliki potensi sosial perekonomian yang tinggi dan potensial untuk dikembangkan. Potensi pada lokasi memiliki berbagai kegiatan dalam perekonomian masyarakat seperti budidaya, perdagangan dan jasa, serta kegiatan sosial budaya berupa seni dan kerajinan. Sumber daya alam yang terletak di pesisir Selat Malaka merupakan potensi yang sangat strategis. Pengembangan lokasi sebagai objek wisata saat ini juga dilakukan, tentunya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat jika terlaksana dengan baik juga sebagai bentuk peningkatan kualitas permukiman dengan menghilangkan kekumuhan. Permasalahan terjadi karena dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan membangun tempat wisata berarti menghilangkan perumahan penduduk sehingga diperlukannya relokasi dengan biaya yang tidak sedikit.

2. Masyarakat dan Pemerintah

Peran serta masyarakat dalam proses pengentasan terhadap kekumuhan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sangat diperlukan. Permasalahan muncul pada sebagian besar masyarakat dikarenakan kekhawatiran terhadap hilangnya tempat tinggal mereka bila kebijakan pemerintah pemerintah dilaksanakan. Permasalahan ini tentu akan memicu konflik kedepannya sehingga diperlukannya solusi terbaik dalam penanganan masalah. Pemerintah Daerah dan pemerintah Gampong memiliki komitmen terhadap penanganan lokasi. Komitmen pemerintah dinilai dari keseriusan terhadap program regulasi, kebijakan, dan kelembagaan, serta pengupayaan nyata untuk pembangunan fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Permasalahan penanganan fisik permukiman berjalan lambat terutama dalam pembangunan, selain itu regulasi yang tegas dari pemerintah juga belum ditetapkan terkait pelanggaran kesehatan lingkungan.

Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman melalui Analisis SWOT

Tabel 2. Strategi Penanganan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Menggunakan Analisis SWOT

STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. 2. Lokasi Strategis dan Potensi sumber daya alam yang terletak di pesisir Selat Malaka tepatnya di Dusun Tugu Pahlawan yang merupakan lokasi kumuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan yang buruk. 2. Akses jalan lingkungan buruk, kondisi jalan rusak dan sempit. 3. Kebersihan tidak terjaga, banyak sampah berserakan. 4. Kondisi bangunan kebanyakan tidak layak dengan peletakan yang tidak tertata.
OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi pesisir memiliki potensi pada kegiatan perekonomian masyarakat dalam berbagai bidang usaha. 2. Dukungan pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas permukiman. merupakan kawasan perencanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki resiko terhadap bencana alam seperti abrasi/gelombang pasang laut. 2. Banjir dikarenakan akses drainase yang buruk.

Berdasarkan tabel 2 hasil analisis SWOT diperoleh beberapa strategi yang dapat digunakan yaitu:

- a. Strategi S-O merupakan strategi strength (kekuatan) dengan memanfaatkan opportunity (peluang), menghasilkan kekuatan dengan peluang berupa upaya pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan yang mampu membangun perekonomian masyarakat juga sebagai bentuk penanggulangan kekumuhan dan peningkatan kualitas permukiman.
- b. Strategi W-O mengatasi weakness (kelemahan) menggunakan opportunity (peluang) hasilnya berupa penyusunan regulasi atau peraturan terkait penanganan permasalahan dan solusi dalam meningkatkan kualitas permukiman.
- c. Strategi S-T merupakan Strategi dengan menggunakan strength (kekuatan) dalam menghadapi threats (ancaman). Sumber daya alam yang terletak di pesisir Selat Malaka tepatnya di Dusun Tugu Pahlawan berperan aktif pada sektor perekonomian masyarakat. Pembangunan tempat wisata diharapkan mampu menghidupkan perekonomian masyarakat juga sebagai bentuk penanganan kekumuhan pada lokasi melalui penataan kembali perumahan, perbaikan jalan lingkungan, serta sarana dan prasarana lainnya. Perbaikan Jalan dilakukan sehingga memungkinkan dapat dilalui dengan lancar sebagai jalur evakuasi disaat bencana terjadi. Penataan kembali perumahan dan relokasi penduduk dilakukan pada lokasi garis sempadan pantai selain menghilangkan kekumuhan juga bertujuan agar penduduk terhidar dari resiko bencana yang dapat menyebabkan korban jiwa maupun harta.
- d. Strategi W-T mengatasi weakness (kelemahan) dan menghindari threats (ancaman) dilakukan melalui perbaikan akses jalan lingkungan, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan perbaikan sarana dan prasarana pada perumahan penduduk, serta penataan dan relokasi rumah penduduk pada lokasi pinggir pantai dilakukan sebagai bentuk upaya menghindari resiko bencana alam.

Upaya Peningkatan Kualitas Fisik Permukiman Gampong Hagu Selatan

Kondisi Perumahan kumuh yang terjadi di Gampong Hagu Selatan tepatnya di Dusun Tugu Pahlawan terjadi dikarenakan keterbatasan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses rumah layak dan sesuai dengan kebutuhannya, hal ini mengakibatkan masyarakat memilih hunian yang murah, berlokasi dekat dengan pusat kegiatan, akan tetapi dalam kondisi yang tidak layak dari segi fisik baik dalam hal kondisi hunian, kepadatan hunian, status lahan, serta kelengkapan infrastruktur. Pemahaman penting dalam upaya peningkatan kualitas fisik lingkungan, kelayakan dan kepemilikan dalam bermukim tidak harus dilakukan dengan memberikan hak kepemilikan akan tetapi berupa kepastian bagi masyarakat dengan menyediakan hunian layak sesuai dengan kemampuan mereka dan tidak digusur pada waktu tertentu.

Penanganan Kumuh Ilegal

1. Relokasi Perumahan Penduduk
Kepemilikan bangunan dan seluruh aset didalamnya merupakan milik pribadi, namun bangunan yang dibangun diatas tanah milik negara (Wilayah Sempadan Pantai). Penanganan kumuh Ilegal yang dapat dilakukan salah satunya dengan dilakukannya pembersihan lahan dan relokasi terhadap penduduk ke Rusunawa.
2. Pemugaran dan Peremajaan pada Bangunan dan Lingkungan Perumahan
Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan kemerosotan kualitas fisik lingkungan yang disebabkan kekumuhan adalah dengan Pemugaran dan peremajaan. Pemugaran adalah melakukan perbaikan dan pengembangan kembali area kumuh menjadi permukiman yang layak dan upaya Peremajaan juga dilakukan dengan mewujudkan permukiman yang jauh lebih baik, serta melakukan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh mencakup aspek sarana dan prasarana lingkungan.
3. Pemukiman Kembali Perumahan Penduduk
Pemukiman kembali, dilakukan dengan memindahkan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali dikarenakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Perumahan Ilegal dan sebagian perumahan kumuh lainnya akan dilakukan pembebasan lahan untuk dibangun kembali pembangunan perumahan penduduk yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pemerintah.
4. Perumahan Sosial Pemerintah
Pembersihan area kumuh Ilegal dilakukan sebagai bentuk penanganan dengan solusi peremajaan, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan membangun perumahan pemerintah yang diperuntukkan bagi sebagian warga yang terkena dampak relokasi. Skema kepemilikan ditentukan berdasarkan:
 - a. Bangunan Sewa.
Penggunaan bangunan dibatasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengupayaan juga harus disertai dengan program peningkatan pada aspek Perekonomian masyarakat sehingga mampu membayar biaya sewa bangunan.
 - b. Bangunan Sewa Beli
Kepemilikan bangunan tidak dibatasi penggunaannya. Status kepemilikan bangunan ditandai dengan SKBG (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung). Bangunan dapat diperjual belikan, namun bangunan tidak dapat dialih

fungsi atau dilakukan perombakan karena status lahan masih milik pemerintah, sehingga perumahan dan bangunan masih terjaga lingkungannya sesuai ketentuan yang dibuat.



(a)



(b)

Gambar 5. (a) Perumahan pada Lokasi Kumuh (b) Ilustrasi Pemukiman Kembali pada Perumahan Penduduk

Pembangunan Wisata JAGU sebagai Bentuk Penanggulangan Kumuh

Kawasan Jawa Hagu atau yang dikenal dengan JAGU mencakup dua Gampong yaitu Gampong Jawa Lama dan Hagu Selatan. Berdasarkan SK (Surat Keterangan) Walikota No 342 Tahun 2014. Kawasan JAGU di Hagu Selatan secara geografis berada di Pesisir pantai dengan kondisi lingkungan tidak terawat, Kumuh serta perumahan masyarakat tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik. Kawasan memiliki potensi dengan letak yang strategis di Pesisir Selat Malaka apabila dikembangkan sebagai tempat rekreasi Tepi Pantai.

1. Konsep Penataan Kawasan

Penataan Kawasan JAGU di Hagu Selatan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan penanganan kumuh dilakukan dengan konsep Urban Desain yang menjadikan tepi pantai bebas kumuh dan menjadi Waterfront area di Kota Lhokseumawe. Kegiatan penanganan dapat dilakukan melalui penanganan fisik dan non fisik, Penanganan fisik kawasan dapat dilakukan dengan pembangunan jalan, perbaikan drainase, sanitasi, dan ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan. Kemudian penanganan non fisik dilakukan juga dilakukan dengan peningkatan ekonomi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai kebersihan

lingkungan serta regulasi yang tegas dari pemerintah terkait pelanggaran terhadap kebersihan lingkungan.

2. Penataan Kawasan

Studi kasus pada permukiman Gampong Hagu Selatan, karakteristik bangunan rumah banyak ditentukan berdasarkan nilai-nilai budaya setempat. Iklim dan kebutuhan pelindung juga turut mempengaruhi bentuk bangunan. Karakteristik bangunan dikelompokkan berdasarkan letak lokasi secara geografis. Permukiman dan perumahan Gampong Hagu Selatan pengelompokan bangunan terdiri dari:

a. Perbaikan Akses Jalan ke Tepi Pantai

Pemugaran jalan ke Tepi Pantai yang rusak perlu dilakukan sehingga menjadi jalan yang rapi, asri, dan nyaman untuk dilalui, sehingga memudahkan akses bagi warga dan pengunjung yang datang. Lebar jalan di bangun ± 8 meter membentang disamping batu pemecah ombak (Break water). Ruas Jalan membelah di sisi pantai memisahkan area pantai dan gerai-gerai kuliner tempat pengunjung menikmati makanan dengan suasana pantai yang indah.

b. Pembangunan Ruang Terbuka Publik

Area yang sebelumnya merupakan bangunan kumuh ilegal dan tempat berserakan sampah juga genangan air limbah rumah tangga dari rumah masyarakat sepanjang garis pantai. Upaya relokasi dan pembangunan perlu dilakukan setelah pembersihan lahan dengan membangun fasilitas publik seperti taman, tempat duduk, dan gerai kuliner.



(a)



(b)

Gambar 6. (a) Kondisi Perumahan Kumuh Kawasan JAGU di Hagu Selatan (b) Ilustrasi Fasilitas Wisata Kawasan JAGU di Hagu Selatan

Komitmen Pemerintah Dukungan Masyarakat

1. Komitmen Pemerintah

Komitmen pemerintah dinilai dari keseriusan terhadap program regulasi, kebijakan, dan kelembagaan, serta pengupayaan nyata untuk pembangunan fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Penanganan masalah kemerosotan kualitas permukiman yang disebabkan oleh kekumuhan dilakukan melalui upaya pencegahan dan perbaikan kualitas lingkungan dan fisik permukiman.

Pencegahan terhadap kekumuhan dijelaskan melalui UU No. 1 Pasal 94 Tahun 2011 yaitu Pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang. Upaya pencegahan wajib dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya upaya peningkatan kualitas lingkungan dan fisik permukiman juga dijelaskan pada pasal 95 dan 96 UU No. 1 Tahun 2011. Pasal 95 yaitu Pencegahan kumuh dapat melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada Pasal 97 menjelaskan peningkatan kualitas kumuh terdiri dari pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan terkait strategi dan pola-pola penanganan secara berkeadilan, manusiawi, ekonomis, dan berbudaya yang diawali dengan penetapan lokasi kumuh disertai pola penanganan melalui pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Pola-pola penanganan dilaksanakan melalui pengelolaan dalam meningkatkan kualitas fisik perumahan dan permukiman.

2. Dukungan Masyarakat

Peran serta masyarakat menjadi hal yang sering dilupakan oleh pemerintah dalam proses penanganan permasalahan permukiman kumuh. Permukiman dan lingkungan berkualitas dapat terwujud bukan hanya dengan program-program dari pemerintah semata. Kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga kualitas permukiman. Kreativitas dan faktor kebersihan masyarakat menjadi landasan dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, dan nyaman. Upaya mengatasi masalah kesehatan lingkungan sebenarnya bukanlah hal yang sulit, hubungan komunitas dengan swadaya masyarakat mengedukasi penduduk sehingga mampu menciptakan lingkungan dan permukiman yang seimbang, selaras, dan serasi dengan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara kolektif mengumpulkan ide-ide yang kreatif serta alternatif terhadap permasalahan permukiman seperti rehabilitasi kawasan kumuh dan penataan kawasan. Dukungan masyarakat terhadap program-program penanganan kumuh dapat diperoleh intinya dengan melibatkan mereka yang terdampak pada setiap tahapan proses. Pendekatan terhadap masyarakat dilakukan dengan metode separtisipatif mungkin. Aspirasi masyarakat harus diperhatikan, sehingga pada saat proses relokasi berjalan tidak terjadi perlawanan dari masyarakat yang disebabkan oleh pemaksaan kehendak pemerintah yang melibatkan bantuan aparat.

Kesimpulan

Perkembangan permukiman Gampong Hagu Selatan khususnya di Dusun Tugu Pahlawan tidak didukung dengan adanya sarana serta prasarana yang memadai. Kondisi bangunan sangatlah buruk dengan penggunaan bahan bangunan yang bersifat semi permanen. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses rumah layak dan sesuai dengan kebutuhannya, mengakibatkan masyarakat memilih hunian dalam kondisi yang tidak layak dari segi fisik kondisi hunian, kepadatan hunian, status lahan, serta kelengkapan infrastruktur. Lokasi sebagian besar merupakan perumahan diatas tanah ilegal yang merupakan tanah Negara peruntukan sempadan Pantai. Permasalahan kemerosotan kualitas fisik

lingkungan permukiman yang disebabkan kekumuhan dapat diatasi dengan upaya Pemugaran dan peremajaan. Pemugaran adalah melaksanakan pengembangan kembali dan perbaikan area kumuh menjadi lingkungan permukiman yang layak dan upaya Peremajaan juga dilakukan dengan mewujudkan permukiman yang jauh lebih baik, serta melakukan penataan mendasar secara menyeluruh dan perombakan mencakup aspek sarana dan prasarana lingkungan. Pembersihan area kumuh ilegal dilakukan sebagai bentuk penanganan dengan solusi pemukiman kembali, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan membangun perumahan pemerintah yang diperuntukkan bagi sebagian warga yang terkena dampak relokasi. Penataan Kawasan JAGU di Hagu Selatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan penanganan kumuh menjadikan tepi pantai bebas kumuh juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya tempat wisata tentunya masyarakat lebih produktif dalam memperoleh penghasilan.

Daftar Pustaka

- [1] I. Kustiwan., & A. Ramadhan. Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(1), (2019) 64.84
- [2] C. A. Doxiadis. Ekistics, the science of human settlements. *Science*, 170(3956), (1970) 393–404.
- [3] A. Rahmawati. Aplikasi SWOT Di Kawasan Permukiman Kumuh (Kelurahan Biring Romang). *Jurnal Seminar Ikatatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia*, (2018) A042–A050
- [4] A. Raharjo. *Pembangunan Kota Optimum, Efisien & Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (2010)
- [5] P. Suparlan (1993). *Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. (1993)
- [6] W. I. Ervianto & S. Felasari. Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Perkotaan. *Jurnal Spektran*, 7(2), (2019). 178–186.
- [7] F. Rangkuti (2006). *Analisis SWOT*, Jakarta: Gramedia Pustaka Ilmu. (2006)
- [8] A. Hapsari & Mutawali. Analisis SWOT Sebagai Perencanaan Desa Wisata Edukasi Agrikultur Cabe Dengan Pendekatan Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 03(1), (2019) 15–25.